BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Satu diantara usaha pemerintah guna mewujudkan visi "Indonesia Emas 2045" ialah dengan mengoptimalkan mutu sumber daya manusia (SDM) dengan menciptakan generasi produktif dan berbakat. Generasi berbakat inilah yang akan dijadikan landasan pembangunan masa depan negeri ini. Melalui pelatihan, pengetahuan dan keterampilan yang unggul, mereka bisa menjadi sumber daya yang berharga untuk menyelesaikan tantangan dan mengembangkan negara lebih lanjut.

Generasi yang lebih baik mempunyai pemahaman budaya, keahlian dan kecakapan menyesuaikan diri akan lebih kompetitif di pasar global. Mereka bisa bertahan dalam dunia kerja yang makin kompetitif dan menghasilkan inovasi-inovasi yang dibutuhkan guna pembangunan ekonomi.

Salah satu hal yang menjadi prioritas utama pemerintah agar tercapainya generasi Indonesia Emas 2045 adalah dari tumbuh kembangnya anak, baik dari tumbuh kembang secara motorik dan fisik (https://kemenkopmk.go.id/menuju-indonesia-emas-2045/10/03/2025). Pemenuhan gizi terhadap tumbuh kembangnya anak adalah faktor yang mesti diselesaikan dalam peningkatan mutu SDM. Kondisi buruk gizi berdampak pada produktivitas dan kecerdasan SDM (Almatsier, 2009).

WHO (2015) menyatakan *stunting* adalah gangguan yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan yang tidak sesuai dengan standar pertumbuhan anak seusianya, ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek, disebabkan oleh kurangnya asupan gizi seimbang dan sistem kekebalan tubuh yang lemah akibat infeksi berulang. Selanjutnya s*tunting* bukan hanya masalah fisik, tetapi juga menghambat perkembangan kognitif anak, sehingga berdampak pada kualitas pendidikan yang didapatkan. Oleh sebab itu, *stunting* dapat menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, karena *stunting* seringkali dikaitkan dengan penurunan kemampuan kognitif dan produktivitas individu, dan risiko penyakit kronis yang lebih tinggi.

Statistik PBB tahun 2020, menjelaskan hampir seperempat anak di dunia mengalami *stunting* (149 juta balita), dan Indonesia punya kontribusi yang cukup

besar (6.3 juta balita). Anak-anak mengalami keterlambatan perkembangan secara fisik dan kekurangan gizi karena kurang makan sejak bayi dan lingkungan yang tidak sehat. Pemerintah menargetkan untuk mengurangi jumlah anak *stunting*, tapi butuh usaha bersama, terutama dari faktor terdekat yaitu keluarga. Angka anak yang terkena *stunting* di Indonesia berada pada kisaran 21,6%. Pemerintah menargetkan untuk menurunkan angka ini menjadi 14% di tahun 2024. (https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/07/11/2024).

Pada tahun 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), melakukan kerjasama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) dan didukung oleh Wakil Presiden, secara rutin melakukan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi gizi balita di seluruh Indonesia. Pemerintah telah menjadikan SSGI sebagai instrumen penting sebagai wujud dalam upayanya menurunkan program *stunting* anak.

Pemerintah memberikan dukungan dalam penanganan *stunting* dengan mengeluarkan PP No.72/2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Kementerian Kesehatan setiap daerah wajib mengumumkan data prevalensi *stunting* yang terjadi di tiap tahunnya. Data SSGI digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan strategis, baik dalam hal alokasi anggaran maupun dalam perumusan kebijakan dalam memecahkan permasalahan, perbaikan gizi pada anak. Walaupun hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 mengalami penurunan dari 28% menjadi 21,6% dibandingkan data tahun 2021 (mencapai 24,4%) masih di atas nilai yang direkomendasikan WHO yakni kurang dari 20%. Melalui Proyek Prioritas Strategis yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 ditetapkan target di tahun 2024 menurunnya prevalensi *stunting* menjadi sebesar 14%. Secara garis besar terdapat dua jenis intervensi menanggulangi *stunting* di desa yaitu Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif. Intervensi spesifik adalah kegiatan yang bertujuan untuk menangani penyebab langsung *stunting*. Sedangkan intervensi sensitif adalah kegiatan yang bertujuan menangani penyebab tidak langsung dari *stunting*.

Rekomendasi kebijakan yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ialah dengan menambah

beberapa kegiatan yang mendukung intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Kemendes PDTT bersama Kementerian Keuangan telah menetapkan perioritas besaran dana desa yang bisa dialokasikan untuk kegiatan penurunan *stunting* di desa seperti diperlihatkan dalam Gambar 1.1.

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (2023)

Gambar 1.1 Perioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penurunan *Stunting*

Selanjutnya angka *stunting* berdasarkan SSGI 2021-2023 menurut provinsi menunjukkan bahwa Sumatera Barat mengalami kenaikan angka *stunting* dari tahun 2021-2022 sebesar 1,9 % dari 23,3% pada tahun 2021 menjadi 25,2 % pada tahun 2022. Sebaliknya pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 23,6%. Beberapa faktor penyebab *stunting* di Sumatera Barat berupa gizi buruk, penyakit dan infeksi, kondisi sosial ekonomi rendah, dan kualitas air dan sanitasi yang buruk. (https://bappeda.agam kab.go.id/View-berita/angka-stunting-di-agam-dansumatera-barattinggi.html/07/ 11 /2024).

Hasil SSGI tahun 2022, di provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa jumlah kejadian *stunting* semakin meningkat di Kabupaten Pesisir Selatan. Prevalensi *stunting* naik sebesar 4,7% dari 25,2% pada Tahun 2021 menjadi 29,8% pada Tahun 2022 sedangkan pada Tahun 2023 mengalami penurunan 2,8 % menjadi 27% (Sumber: https://mediaindonesia.com/12-3-2024). Oleh karena itu, pencegahan *stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan perlu menjadi perhatian agar generasi muda berpatisipasi menjadi generasi Indonesia Emas.

Kabupaten Pesisir Selatan telah menerima dana desa untuk penyelenggara posyandu semenjak tahun 2015. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bahwa dana

desa dalam kegiatan Penyelenggarakan Posyandu untuk penanganan *stunting* pada tahun 2022 anggaran dana desa Penyelenggarakan Posyandu sebesar Rp.8.008.450.786,- sedangkan tahun 2023 anggaran dana desa dalam kegiatan Penyelenggarakan Posyandu sebesar Rp. 8.701.082.690,-. Rincian anggaran desa, persentase kasus *stunting* yang ditangani serta status desa per nagari Kabupaten Pesisir Selatan 2022 dan 2023 dapat diperlihatkan pada Lampiran I dan Lampiran II.

Selanjutnya penanganan *stunting* juga dapat dievaluasi menurut status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Hal ini mengacu pada taraf kemampuan dan kemandirian desa dalam beragam lini tertentu untuk menjalankan aktivitas yang diarahkan oleh pemerintah daerah guna mencapai tujuan pembangunan. IDM ialah instrumen pemerintah Indonesia guna memantau dan mengukur pembangunan desa. Selain dari itu, IDM juga merupakan instrumen untuk mengukur kemajuan desa sehingga rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan bisa dirumuskan secara lebih tepat sasaran.

Sampai sekarang belum adanya penelitian yang mendalami penanganan *stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan yang dipengaruhi oleh dana desa dan status desa. Oleh sebab itu penelitian ini fokus terhadap penanganan *stunting* di nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan yang dipengaruhi oleh dana desa dan status desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana perkembangan dana desa, status desa dan penanganan *stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan?
b. Bagaimana penanganan *stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi oleh dana desa dan status desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menganalisis perkembangan dana desa, status desa dan penanganan *stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Menganalis penanganan *stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan yang dipengaruhi oleh dana desan dan status desa

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan pengetahuan tentang penanganan *stunting* diantaranya:

a. Memperoleh pengetahuan baru dimana penelitian ini menemukan informasi yang sebelumnya belum diketahui dalam penanganan *stunting*.
b. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana penanganan *stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi oleh dana desa dan status desa
c. Melalui penelitian ini diharapkan solusi atau terobosan penanganan *stunting* khususnya untuk Kabupaten Pesisir Selatan.
d. Memperluas informasi tentang hubungan sebab akibat alokasi dana, status desa terhadap penanganan *stunting* .
e. Menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan terhadap berbagai program yang ada di desa khususnya pada lingkup kesehatan masyarakat yang berupaya untuk penanganan *stunting*

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian penanganan *stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan sangat dipengaruhi oleh dana desa dan status desa dilakukan dengan fokus utamanya adalah memahami bagaimana pengaruh alokasi dana desa dan status desa terhadap penanganan *stunting.* Penelitian ini memakai seluruh populasi nagari / desa di Kabupaten Pesisir Selatan. Penggunaan data penelitian mencakup periode tahun 2022 hingga tahun 2023, untuk melihat tren dan dampak penggunaan dana desa dalam jangka waktu tersebut. Analisis data diterapkan adalah metode kuantitatif. Teknik analisis regresi juga digunakan dalam mengetahui optimalisasi dana desa dan status desa terhadap penanganam *stunting* dengan variabel bebasnya (seperti desa mandiri, berkembang, atau ketertinggalan) sedangkan variabel terikat adalah persentase jumlah kasus *stunting* dibagi balita yang diinput yang tertangani tahun 2022 dan tahun 2023.